



► RAPBD 2022

Pajak Hotel Digenjot untuk Menekan Defisit

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak utamanya yaitu sektor perhotelan guna menekan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Sebelumnya Pemkot Jogja telah mengusulkan RAPBD 2022 kepada DPRD sebesar Rp2,012 triliun dan masih defisit 8,36%. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa daerah dengan fiskal tinggi tidak diperbolehkan defisit anggaran di atas 5%.

DPRD Kota Jogja pun mengingatkan agar eksekutif segera merasionalisasi RAPBD 2022 dan mengurangi defisit sebanyak 3% lebih yang setara dengan nominal sebanyak kurang lebih Rp196 miliar.

"Kami mengupayakan [merasionalisasi angka defisit pada RAPBD 2022], dan teman-teman dari dinas juga

► Tahun lalu dan tahun ini Pemkot Jogja masih memberikan keringanan kepada pengusaha hotel dalam membayar pajak.

► Pemkot Jogja disarankan memaksimalkan pendapatan di luar sektor pajak.

tengah merasionalisasi anggaran dan masih mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran [RKA] baik dengan Dewan dan TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah]," kata Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, Rabu (17/11).

Haryadi mengungkapkan, pengurangan defisit dalam RAPBD 2022 itu nantinya disiasati dengan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak terutama perhotelan. Di sisi lain, kegiatan atau pos anggaran yang sekiranya mungkin untuk diadakan akan dihapus sebelum masa pengesahan jatuh pada akhir November mendatang.

"Defisit itu nanti bisa ditutup dengan adanya pendapatan, di satu sisi pendapatan dari sektor lain juga akan dioptimalkan. Pos anggaran yang sekiranya mungkin itu dikurangi. Tim satgas pajak juga akan

bicara dengan organisasi perangkat daerah [OPD] dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] agar mengintensifkan lagi nanti kinerjanya ke depan," katanya.

Haryadi menambahkan kebijakan Pemkot Jogja dalam menekan defisit dalam RAPBD 2020 juga tidak hanya pada pengurangan pos anggaran atau belanja daerah. Saat ini, pemaksimalan pungutan pajak dari sektor perhotelan sangat mungkin diberlakukan normal kembali.

Dana Transfer

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudiymoko menyebut, tahun ini Pemerintah Pusat lewat Kementerian Keuangan juga mengurangi jumlah dana transfer ke daerah karena dampak pandemi Covid-19. Alhasil, kebijakan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap RAPBD 2022.

Pemkot Jogja disarankan memaksimalkan pendapatan di luar sektor pajak.

Misalnya Dinas Perdagangan agar bisa menangkap potensi lapak digital, Dinas Perhubungan membuat sistem digital informasi kapasitas parkir serta OPD lain untuk mengadakan kegiatan yang memiliki timbal balik terhadap pendapatan daerah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005